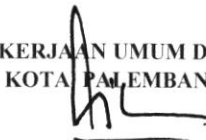


**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOTA PALEMBANG**

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Tugas : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, sesuai dengan lingkup tugasnya.
 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas yang diembannya.
 2. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
 3. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data	
1.	Terwujudnya infrastruktur jalan, jembatan dan sumber daya air yang berkualitas dan merata	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat	1.1.1	Jumlah jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan	Jumlah akhir tahun pencapaian SPM Panjang jalan penghubung Pusat Kegiatan (PK) dibagi jumlah seluruh PK Panjang jalan penghubung PK	Kasi pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas PU-PR
			1.1.2	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Jumlah panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (km) dibagi panjang jalan kota (km) x 100%	Kasi Drainase dan SPAM	Dinas PU-PR
			1.1.3	Panjang jalan kota dalam kondisi baik	Panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut	Kasi pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas PU-PR
			1.1.4	Jumlah persentase jalan dalam keadaan baik	Panjang jalan dalam kondisi baik dibagi panjang seluruh jalan kota di daerah tersebut X 100 %	Kasi pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas PU-PR
			1.1.5	Jumlah jembatan dalam kondisi baik	Panjang jembatan dalam kondisi baik dibagi panjang seluruh jembatan kota di daerah tersebut	Kasi pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas PU-PR
			1.1.6	Jumlah persentase jembatan dalam kondisi baik	Panjang jembatan dalam kondisi baik dibagi panjang seluruh jembatan kota di daerah tersebut X 100 %	Kasi pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas PU-PR
		Mengurangi titik genangan banjir	1.1.7	Jumlah titik genangan banjir yang terselesaikan	Luas Wilayah kebanjiran (titik) dibagi dengan luas daerah banjir (titik)	Kasi Drainase dan SPAM	Dinas PU-PR
			1.1.8	Persentase kawasan yang bebas banjir	Luas kawasan yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi kota genangan dibagi luas seluruh kawasan x 100 %	Kasi Drainase dan SPAM	Dinas PU-PR
		Meningkatnya ketersediaan air bersih	1.1.9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih	Jumlah rumah tangga yang meliki akses air bersih dibagi dengan jumlah seluruh jumlah rumah tangga x 100 %	Kasi Drainase dan SPAM	Dinas PU-PR
			Meningkatnya kualitas sanitasi masyarakat	1.1.10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah	Jumlah rumah tangga yang meliki akses air limbah dibagi dengan jumlah seluruh jumlah rumah tangga x 100 %	Kasi Pengembangan Sistem IPAL
2.	Terwujudnya tata ruang yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang sesuai RTR		1.1.11	Persentase kawasan yang dimanfaatkan sesuai dengan RTR	luas kawasan yang dimanfaatkan sesuai dengan RTR dibagi dengan luas seluruh kawasan x 100 %	Kasi Perencanaan Tata Ruang

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PALEMBANG**



Ir. H. SAIFUL
NIP.19580127 199301 1 002